SAMPAI H-7 IDUL FITRI

18 Perusahaan di DIY Belum Bayar THR

YOGYA (KR) - Sampai H-7 Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M, Posko Aduan Tunjangan Hari Raya (THR) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY mencatat ada 18 perusahaan di DIY yang belum membayarkan THR kepada para pekerjanya.

Dari 18 perusahaan tersebut, tujuh di antaranya berada di Kabupaten Sleman. Sedangkan Kota Yogyakarta ada lima perusahaan, Kabupaten Bantul tiga perusahaan, Kulonprogo dua perusahaan, dan Gunungkidul satu perusahaan. Kebanyakan perusahaan tersebut belum bisa membayarkan THR karena mengalami kerugian. Adapun untuk jenis perusahaannya berupa outsourcing, manufaktur, transportasi dan kesehatan.

"Dari 18 perusahaan tersebut ada yang sudah selesai dan disepakati untuk dibayar pada Rabu (3/4), tapi ada juga yang masih konfirmasi. Kami menunggu sampai pukul 24.00 WIB. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan mereka belum bisa membayar, kami akan terus dorong perusahaan tersebut agar sebelum Lebaran bisa membayarkan. Langkah itu dilakukan karena kami melihat kelangsungan usaha mereka agar tetap eksis," kata Koordinator Satgas Posko Aduan THR Disnakertrans DIY R Darmawan di Yogyakarta, Rabu (3/4).

Wawan mengungkapkan, jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah perusahaan yang belum membayarkan THR sampai H-7 mengalami penurunan. Karena sejumlah perusahaan ada yang telah berkomitmen segera membayarkan THR kepada pekerjanya sebelum Lebaran. **(Ria)-f**

Menhub:

Sambungan hal 1

Ditambah lagi, potensi pergerakan masyarakat pada momen mudik kali ini melalui survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub sebesar 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebesar 193,6 juta orang. "Angka ini memang besar dan termasuk di dalamnya pergerakan di dalam kota, antarkota di aglomerasi hingga antarprovinsi. Tahun lalu juga kami memverifikasi angka 123 juta dengan pergerakan masyarakat melalui mobile positioning, dan angkanya benar. Nah, angka tersebut sebenarnya justru bisa dipakai sebagai peringatan untuk mempersiapkan ini dengan serius," ujar Budi.

Budi menyampaikan, Kementerian Perhubungan bersama para pemangku kepentingan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan mengusung tagline Mudik Ceria Penuh Makna pada Lebaran 2024. "Harapannya, pelaksanaan mudik Lebaran 2024 dapat berjalan dengan aman, nyaman, selamat, dan berkesan," ucap Budi.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Menhub meminta seluruh pihak, baik Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah siap menyambut dan mengantisipasi lonjakan pemudik, khususnya di Jawa Tengah sebagai daerah tujuan perjalanan terbesar dan Jawa Timur sebagai daerah asal perjalanan terbesar. **(Ant/San)-d**

Mudik-

Sambungan hal 1

atau melakukan pemilahan sampah untuk mempermudah proses penanganannya. Ditargetkan juga peran aktif pengelola fasilitas publik dan Pemerintah Daerah terutama untuk penanganan sampah pada jalur-jalur mudik dan daerah penyangga. "Kita harapkan selain mengkampanyekan, mereka menyiapkan sarana prasarana yang memang mengantisipasi itu, terlebih lagi sarana prasarana misalnya tempat sampah terpilah juga disiapkan," ujar Novrizal.

KLHK secara khusus meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengantisipasi timbulan sampah tambahan dampak aktivitas mudik selama Lebaran 2024. Menurut Novrizal Tahar, imbauan kepada Pemda soal penanganan sampah sudah dilakukan lewat Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 145 Hijriah diterbitkan pada 28 Maret 2024.

"Di edaran itu juga ada hal pentingnya terkait dengan bagaimana Pemerintah Daerah juga menyiapkan Satgas, itu ada kita tekankan di dalam edaran itu," kata Novrizal.

Dalam edaran itu, KLHK mengimbau Pemda membentuk Posko Satuan Tugas Khusus untuk penanganan sampah pada H-7 dan H+7 Lebaran demi mengantisipasi penumpukan sampah di area tertentu.

KLHK juga meminta kepada para kepala daerah untuk memfasilitasi dan mengawasi penanganan sampah terutama pada jalur arus mudik dan daerah penyangga selama periode mudik dan pelaksanaan Lebaran. Selain itu, Pemda diminta memastikan pengelolaan sampah secara khusus di titik-titik ramai pemudik termasuk terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara di wilayah masing-masing.

"KLHK juga mengimbau agar disediakan fasilitas penampungan sampah terpilah dan untuk mengantisipasi kesulitan para pemudik membuang sampah perlu dilakukan pengumpulan sampah dengan cara berkeliling. Semua imbauan itu untuk menyukseskan Gerakan Mudik Minim Sampah yang sudah disosialisasikan KLHK sejak 2018 dan menjadi bagian dari Program Mudik Nasional," jelasnya.

Menurutnya, pada tahun ketujuh ini diharapkan Pemda sudah siap sebenarnya mengantisipasi persoalan-persoalan sampah di daerah yang timbul akibat dari mudik Lebaran dan sebagainya. **(Ant/San)-f**

Kejagung

Sambungan hal 1

Penyitaan juga sudah dilakukan terhadap tersangka Helena Lim, crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK). Dalam penggeledahan dari tanggal 6-8 Maret, penyidik menyita barang bukti elektronik, kumpulan dokumen terkait serta uang tunai sebesar Rp 10 miliar dan 2 juta dolar Singapura yang diduga kuat berhubungan atau merupakan hasil tindak kejahatan.

Serangkaian penggeledahan juga dilakukan Rabu (30/12) di beberapa tempat yakni kantor, perusahaan dan rumah tinggal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salah satunya yakni Kantor PT RBT.

Jampidsus telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka, yakni SW alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik Tersangka TN alias AN); MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021; EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018.

Selanjutnya, BY selaku Mantan Komisaris CV VIP; RI selaku Direktur Utama PT SBS; TN selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN; AA selaku Manajer Operasional tambang CV VIP; RL selaku General Manager PT TIN; SP selaku Direktur Utama PT RBT; RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT; ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah Tbk.

Kemudian, dua tersangka yang menarik perhatian publik, yakni crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim selaku manajer PT QSE dan Harvey Moeis, selaku perpanjangan tangan PT RBT. **(Ant)-d**

Tesla

Sambungan hal 1

Ketika Anda diminta memilih, manakah yang akan Anda miliki, apakah mobil listrik BYD buatan Wang Chuanfu dari China, atau Tesla buatan Elon Musk dari AS, dengan asumsi, Anda sudah diberi dana gratis? Mungkin sebagian besar dari Anda lebih memilih Tesla, karena buatan Amerika, dibanding BYD, yang mungkin baru Anda dengar hari ini. BYD adalah singkatan dari Build Your Dream (wujudkan mimpi Anda).

Tetapi, setelah membaca artikel ini, Anda mungkin akan mengubah pilihan. Anda mungkin tidak mengenal siapa itu Wang Chuanfu, padahal tahun 2009 dia menjadi orang terkaya di China setelah perusahaan pembuat baterai isi ulang yang didirikannya, mendapat suntikan dana sebesar USD 230 juta dari Berkshire Hathaway Inc, yang notabene adalah salah satu perusahaan investor kondang Warren Buffet. Wang sebelumnya mendirikan pabrik baterai ponsel, kemudian mengembangkan mobil listrik F3E, setelah pada tahun 2000 gagal mengembangkan mobil buatannya yang diberi merek F3.

Tahun 2011, ketika diwawancara oleh seorang penyiar TV dan ditanya pendapatnya tentang mobil BYD, Elon Musk hanya menjawab dengan tertawa. Saat itu Elon Musk sudah mendirikan perusahaan pembuat pesawat luar angkasa Space X, tentu menggunakan teknologi yang sangat mutakhir. Selain itu, perusahaan mobil listrik buatannya, yaitu Tesla, baru saja go public. Tentu Elon merasa BYD yang dikembangkan oleh pabrik pembuat baterai ponsel, bukanlah apa-apa dan tidak perlu digagas, apalagi dianggap sebagai pesaing.

Namun setelah satu dasawarsa berlalu, pada semester pertama tahun 2023 yang lalu, BYD mampu menjual 641 ribu mobil listrik, sedang Tesla hanya 564 ribu. Di kuartal ke-3, penjualan Tesla mengalami kenaikan 7% yaitu 343.830 unit, sedang BYD menalami kenaikan 190% menjadi 537.164. Para CEO perusahaan otomotif dunia, baik dari Ford, VW dan sebagainya, mulai menganggap bahwa BYD adalah perusahaan otomotif yang akan menguasai dunia.

Strategi yang dilakukan Wang rupanya sangat jitu. Katanya, untuk membuat mobil listrik tidak perlu teknologi tinggi, karena hanya memasang baterai dan motor, sehingga 75% komponen BYD bisa dibuat sendiri, sementara Tesla hanya 46%.

Pemerintah Indonesia

Tahun 2022 Menteri Luhut Binsar Panjaitan mendatangi Elon Musk di AS untuk mengajak investasi di Indonesia. Namun untungnya Elon belum menyepakati hingga kini, malah menawarkan investasi Internet melalui Starlink miliknya. Sebaliknya, BYD telah masuk ke Indonesia dan mobilnya sudah mulai dijual di sini. Meskipun Wuling sudah lebih dulu masuk ke tanah air, tetapi kiprah BYD tidak dapat diremehkan. Disain mobil-mobilnya seperti SEAL, ATTO 3, dan Dolphin sangat sporty dan bakal mudah diterima konsumen di Indonesia. Lihat saja di webnya byd-indonesia.co.id.

BYD akan mendirikan pabrik mobil dan baterainya di Indonesia tahun 2024 ini, namun sedang dipertimbangkan apakah di Jawa Barat atau Jawa Tengah. Rencananya akan memproduksi 150 ribu unit mobil pertahun. Selain itu BYD juga sudah mendirikan pabrik di berbagai negara, termasuk di Mexico untuk masuk ke pasar AS, karena di AS sedang terjadi sentimen anti China, mirip di Indonesia. Bedanya, kalau di AS yang anti China adalah pemerintahnya, sedang di Indonesia adalah sebagian masyarakat yang mengaitkan para pekerja China dengan pilihan politik. Apakah BYD juga akan diterima pasar Indonesia? Kita akan melihatnya dalam 2-3 tahun ke depan.

(Penulis adalah Dosen STIE YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta, dan Komisaris Utama PT AMI)-d

HISWANA MIGAS DIY BAGIKAN SEMBAKO

Idul Fitri, Pasokan BBM-Gas di DIY Aman

YOGYA (KR) - Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M, pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas/elpiji di wilayah DIY dipastikan mencukupi dan mendapatkan cadangan yang aman dari Pertamina. Karena itu masyarakat tidak perlu khawatir bakal terjadi kelangkaan.

"Pasokan BBM dan gas/elpiji aman, sehingga masyarakat jangan khawatir. Pasokan cukup dan terjangkau masyarakat," ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (DPC Hiswana Migas) DIY Aryanto Sukoco di sela acara penyerahan bantuan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu, di Kantor DPC Hiswana Migas DIY, Jalan Parangtritis, Yogya, Rabu (3/4).

Menurut Aryanto Sukoco didampingi Pengurus DPC Hiswana Migas DIY lainnya, pemberian paket sembako ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial Hiswana Migas DIY kepada masyarakat menjelang Idul Fitri 1445 H.

KR-Istimewa

Ketua DPC Hiswana Migas DIY Aryanto Sukoco bersama pengurus lainnya menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

Aryanto Sukoco menjelaskan, bantuan berupa 130 paket sembako disalurkan untuk masyarakat sekitar yang kurang mampu. "Pemberian bantuan paket sembako ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian, karena Hiswana Migas berada di tengah masyarakat dan sudah seharusnya bermanfaat bagi masyarakat sekitar," katanya.

Kegiatan seperti ini, imbuh Aryanto, selalu dilaksanakan setiap tahun sebagai wujud kedekatan dengan masyarakat yang membutuhkan. "Alhamdulillah masyarakat sangat antusias terhadap aksi sosial ini. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat," ucapnya. **(San)-f**

Tak Perlu

Sambungan hal 1

"Pertanyaan saya, saudara saksi kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final penghitungan suara adalah manual dan penghitungan berjenjang bukan hasil dari Sirekap, masih perlu *nggak* Bapak kuliah di sini, masih perlu *nggak* kita bahas tentang Sirekap?" tanya Hotman.

Saldi kemudian menegur Hotman. Ia menegaskan, kehadiran ahli dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres ini sangat penting karena Mahkamah memerlukan keterangan yang bersangkutan. "Jadi jangan kita mengabaikan, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru. Kalau *nggak, enggak* usah datang saja ke sini," ucap Saldi yang memimpin jalannya persidangan.

Selain itu, hakim MK Arief Hidayat juga menegur Hotman. Arief menegaskan, duduk persoalan mengenai penggunaan Sirekap perlu diketahui seluruh pihak, termasuk masyarakat yang menyaksikan persidangan. "Karena persidangan ini terbuka untuk umum, seluruh masyarakat Indonesia mengetahui dan Mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 1 (Anies-Muhaimin) dan pemohon 3 (Ganjar-Mahfud)," ucap Arief.

Arief mengatakan, semua dalil yang relevan dalam permohonan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud akan dijawab oleh MK. Namun, Hotman berkukuh dengan pernyataannya.

"Terima kasih Yang Mulia, atas tanggapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama penghitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi Sirekap," kata Hotman menjawab Arief.

Mendengar pernyataan Hotman, Saldi lantas menegaskan yang menjawab dalil pemohon adalah MK, bukan kuasa hukum pihak terkait. Ia juga mengingatkan Hotman untuk tidak menggiring hakim konstitusi. **(Ant/Obi)-d**

Hakim

Sambungan hal 1

Sebagian peserta aksi lainnya membawa poster dengan tulisan-tulisan, 'Meski Langit Runtuh Keadilan Harus Ditegakkan', kemudian ada tulisan lain berbunyi 'Semoga Hakim MK Tidak Masuk Angin', 'Hakim Konstitusi Aja Melu Kethir', 'Semoga Palumu berpihak kepada Akal Sehat' dan lain-lain.

"Harapan kami agar hakim MK dapat memutuskan perkara seadil-adilnya serta sejujur-jujurnya demi nasib demokrasi dan keadilan di tanah air," tandas Widihasto, salah satu aktivis 98 yang ikut berorasi.

Widihasto menyatakan sulit dikatakan bahwa Pilpres 2024 terlaksana secara jujur, adil dan bermartabat. "Hal ini lantaran Pilpres sarat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) secara terang benderang. Mulai dari rekayasa perubahan konstitusi, pelanggaran peraturan KPU, pengerahan aparat negara, politisasi bansos hingga dugaan kecurangan pemilu yang berujung pada gugatan PHPU Pilpres 2024 ke MK," jelasnya.

Diawal aksi teatrikal muncul sosok menyerupai Paman Usman mantan Ketua MK, yang menyesal telah meloloskan Gibran (anak Presiden Jokowi) sebagai calon Wakil Presiden. "Guwe gabut gara-gara Gibran, sekarang mengemis saja," ucap pemeran Paman Usman yang sempat melakukan aksi mengemis di perempatan.

Setelah itu, dilanjutkan orasi dan pernyataan sikap dari peserta aksi dan kemudian secara tertib dengan mengambil antrean mengirimkan paket rompi anti peluru yang dialamatkan ke Ketua Mahkamah Konstitusi Dr Suhartoyo SH MH, Jalan Merdeka Barat No 6 Jakarta. **(Vin)-f**

Presiden

Sambungan hal 1

Ketua MK Suhartoyo mengatakan, pemanggilan para pihak itu berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga dipastikan datang dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024, Jumat besok, karena telah menerima undangan. "Ibu Menteri dijadwalkan menghadiri panggilan MK di sidang sengketa Pemilu, Jumat 5 April," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo.

Sri Mulyani menjadi salah satu menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang diminta hadir sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024. **(Ant/Obi)-f**

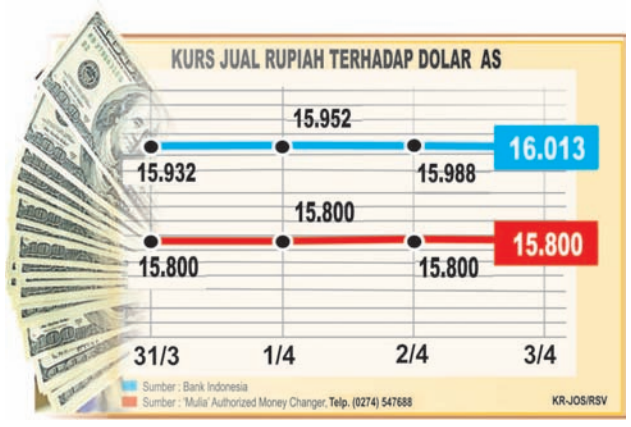

Prakiraan Cuaca — Kamis, 4 April 2024

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

Upaya Negara Mengatur Teknologi Kecerdasan Buatan

Aditya Maulana Hasymi, S.IP., M.A
Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas AMIKOM Yogyakarta

BABAK baru revolusi industri telah sampai di depan mata. Teknologi dengan segala perkembanganya telah mengambil peran secara multisektor termasuk politik global. Tak terkecuali satu yang berpotensi mendominasi yakni teknologi artificial intelligence atau akrab disebut sebagai kecerdasan buatan.

Kehadiran teknologi kecerdasan buatan secara signifikan telah mempengaruhi kehidupan manusia. Layaknya perkembangan teknologi dalam periode revolusi industri, bentuk teknologi baru ini tentu akan menciptakan kondisi disrupsi. Hanya saja teknologi kecerdasan buatan ini tampak berbeda. Hadirnya AI ternyata mampu menginisiasi pergeseran percaturan politik global secara sistematis karena mengancam status negara sebagai pelaku utama.

Sang kreator dari teknologi kecerdasan buatan, disadari atau tidak, telah membuat produk yang hadir di era revolusi industri kelima ini layaknya sebuah aktor politik global. AI di-desain memiliki kedaulatan secara mandiri dengan sokongan institusi global bernama perusahaan teknologi multinasional. Tak hanya itu, dengan domain yang dibentuk oleh perusahan pengembang AI yang beroperasi secara global, muncul tatanan baru dalam geopolitik berupa 'technopolar' -- kondisi dimana pihak yang memiliki teknologi terbaru akan punya posisi tawar lebih tinggi.

Mencuatnya teknologi kecerdasan buatan sebagai hal yang mencuri perhatian dalam lingkup politik global merupakan imbas dari naik daunya perusahaan teknologi multinasional. AI secara spesifik dikembangkan oleh multinational corporation seolah meniru kemampuan manusia: berpikir secara cepat dan sistematis dengan independent. Alhasil, kondisi ini menciptakan security dilemma bagi negara dalam kontestasi geopolitik untuk memilih berupaya beradaptasi dengan mengejar ketertinggalan atau tergilas habis.

Sebuah pertanyaan muncul ke permukaan sebagai respons atas babak baru revolusi industri ini: bagaimana upaya Negara untuk tetap relevan sebagai aktor utama dalam percaturan politik global di tengah masifnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan?

Negara tampak tidak menunggu lama untuk memberikan respon atas kehadiran AI dalam kontestasi politik global. Secara cepat para pembuat kebijakan mulai menyadari tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi kecerdasan buatan dan berupaya mengaturnya sedemikian rupa.

Tiongkok sebagai negara adikuasa baru bergegas menindaklanjuti AI agar tak berdampak negatif pada politik luar negerinya. Negeri tirai bambu ini memilih untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan kecerdasan buatan dengan membuat cetak biru bertajuk 'A New Generation of Artificial Intelligence Development Plan pada tahun 2017. Fei Wu, et.al. (2020) dalam artikel ilmiahnya berjudul "Towards a New Generation of Artificial Intelligence in China" menjelaskan bahwa pemangku kebijakan di China telah sepakat menggunakan kecerdasan buatan sebagai satu kesatuan dalam memperkuat pembangunan ekonomi. Tiongkok secara sistematis melalui blueprint tersebut bahkan telah mencanangkan target sebagai negara sentral pengembangan AI di dunia pada tahun 2030 yang berfokus pada produksi, tata kelola, dan pertahanan.

Amerika Serikat tampak tidak tinggal diam dengan respons Tiongkok beradaptasi terhadap AI. Presiden Donald Trump sebagai pemimpin negara mengeluarkan executive order no 13859 terkait mempertahankan kepemimpinan Amerika Serikat dalam teknologi kecerdasan buatan pada tanggal 11 Februari 2019. Langkah tersebut merupakan klaim tegas dari negara paman sam ini dalam hal menetapkan prinsip dan strategi guna meningkatkan kemampuan dalam bidang AI pada sektor serupa Tiongkok: daya saing ekonomi dan keamanan nasional.

Pada level kawasan pun juga tak ingin tergerus dengan kemunculan teknologi kecerdasan buatan di politik global. Wilayah benua biru Eropa lewat organisasi regionalnya, Uni Eropa, sepakat untuk menyusun peraturan dengan nama 'EU AI Act'. Kesepakatan yang diketok palu secara regional pada bulan Juli 2023 ini digadang-gadang sebagai produk hukum pertama yang secara komprehensif mengatur penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Hadirnya payung hukum ini berupaya untuk memastikan agar negara anggota Uni Eropa benar-benar menggunakan AI untuk pembangunan ekonomi dan layanan publik seperti transportasi layanana kesehatan yang terjangkau, serta energi berkelanjutan.

Langkah antisipatif dari negara akan besarnya pengaruh teknologi kecerdasan buatan dalam lanskap geopolitik patut menjadi perhatian. Hanya saja para aktor hubungan internasional ini masih perlu mengantisipasi efek lanjutan dari upaya mengatur AI: apakah akan digunakan sebagai piranti baru untuk memperluas kekuatan nasional secara agresif atau menggunakanya sebagai pilar penggerak perdamaian.***

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park